



IMPLEMENTASI SISTEM BIROKRASI DI INDONESIA BELUM OPTIMAL

Amelia Nabila Pramesthi

Universitas Negeri Semarang

Isna Khalimatussa'diah Az-Zahra

Universitas Negeri Semarang

Salsa Alfi Widowati

Universitas Negeri Semarang

Elsa Ratna Duhita

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Korespondensi penulis: amelianabilap@students.unnes.ac.id

***Abstrak.** The bureaucracy is a government tool to provide public services and act as a planner, implementer, and supervisor of policies. As an institution that represents the state in implementing public policies, the bureaucracy has political aspects. Therefore, the question arises in the current situation or era, whether politics is more dominant in influencing the performance of the bureaucracy or vice versa, the bureaucracy influences politics in policy making. In addition, whether the bureaucracy can be neutral in politics. Political influence on the bureaucracy, especially in the formulation of state budget policies, often leads to political pressures on the executive and creates chaos in the government. The purpose of this article is to describe the political journey in Indonesia. The author uses a descriptive qualitative method to collect and analyze data, by thoroughly describing the observed events. The results show that bureaucracy can influence a country's political policies. Therefore, it is necessary to design a bureaucracy that is able to overcome these various problems. In the short term, the new bureaucratic design needs to be intensively improved to encourage the spirit and performance of the bureaucracy.*

Keywords: Bureaucracy, Politic, Law

Abstrak. Birokrasi adalah alat pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik serta bertindak sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan. Sebagai institusi yang menjadi representasi negara dalam melaksanakan kebijakan publik, birokrasi memiliki aspek politik. Oleh karena itu, timbul pertanyaan dalam situasi atau era saat ini, apakah politik lebih dominan mempengaruhi kinerja birokrasi atau sebaliknya, birokrasi yang mempengaruhi politik dalam pembuatan kebijakan. Selain itu, apakah birokrasi dapat bersikap netral dalam politik. Pengaruh politik terhadap birokrasi, terutama dalam penyusunan kebijakan anggaran belanja negara, sering kali menimbulkan tekanan-tekanan politik kepada eksekutif dan menciptakan kegaduhan dalam pemerintahan. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan perjalanan politik di Indonesia. Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengumpulkan dan menganalisis data, dengan menggambarkan peristiwa yang diamati secara menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa birokrasi dapat mempengaruhi kebijakan politik suatu negara. Oleh karena itu, perlu adanya desain birokrasi yang mampu mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Dalam jangka pendek, desain birokrasi yang baru perlu ditingkatkan secara intensif untuk mendorong semangat dan kinerja birokrasi.

Kata Kunci: Birokrasi, Politik, Hukum

PENDAHULUAN

Birokrasi dapat diartikan sebagai kekuasaan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip ideal berjalannya sebuah organisasi. Setiap posisi dan tanggung jawabnya dijelaskan secara jelas dalam organigram dan memiliki aturan serta prosedur yang ketat, sehingga cenderung kurang fleksibel. Ciri lain adalah banyaknya formulir yang harus diisi dan pendelegasian wewenang yang harus sesuai dengan hierarki kekuasaan.

Ada tiga macam pengertian birokrasi yang berkembang saat ini seperti yang disebutkan oleh Taliziduhu Ndraha (2003), yaitu:

- 1) Birokrasi diartikan sebagai aparat yang diangkat penguasa untuk menjalankan pemerintahan (*government by bureaus*).
- 2) Birokrasi diartikan sebagai sifat atau perilaku pemerintahan yang buruk (*patologi*).
- 3) Birokrasi sebagai tipe ideal organisasi.

Menurut Michael G. Roskin, et al., birokrasi merupakan organisasi besar yang tersusun atas pejabat yang ditunjuk. Fungsi utama birokrasi adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan. Idealnya, birokrasi merupakan sistem yang terstruktur dan rasional, dirancang untuk memungkinkan pelaksanaan kebijakan publik yang efektif dan efisien.¹

Birokrasi di setiap negara memiliki aturan yang berbeda, sesuai dengan sistem pemerintahannya. Sehingga, birokrasi di negara maju umumnya berbeda dengan di negara berkembang. Kualitas birokrasi di Indonesia dapat dinilai dari pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Sebagai negara berkembang, kualitas pelayanan publik di Indonesia masih perlu ditingkatkan, karena belum semua masyarakat menikmatinya secara merata. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kondisi geografis, keterbatasan sumber daya manusia, sumber pendanaan, teknologi informasi, dan infrastruktur publik yang belum memadai.

Birokrasi merupakan alat pemerintah untuk menyediakan layanan publik serta merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan. Birokrasi dapat mempengaruhi kebijakan politik suatu negara dengan beberapa cara, yaitu:

¹ Birokrasi dan Administrasi Negara - ADM. NEGARA (administrasinegaraku.blogspot.com) di akses pada 25 Mei 2024

- 1) Birokrasi memainkan peran penting dalam penunjukan pejabat publik, terutama di tingkat eksekutif dan legislatif.² Pejabat eksekutif seringkali diangkat oleh pemimpin terpilih, seperti presiden atau gubernur sebagaimana memiliki pemahaman politik yang kuat dan diharapkan mendukung agenda politik mereka yang mengangkatnya.
- 2) Apabila birokrasi terlalu politis, ia dapat mempengaruhi kebijakan ketika pejabat dan pegawainya terlibat dalam politik partai dan pemilu. Hal ini bisa menghilangkan batas antara birokrasi dan politik, serta dapat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan politik daripada kepentingan administratif. Birokrasi yang mampu menempatkan politik sebagai alat untuk mensejahterakan masyarakat adalah birokrasi yang kuat. Oleh karena itu, politik dalam birokrasi seharusnya tidak hanya didominasi oleh ambisi kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu.³

KAJIAN TEORI

Solusi yang baik sangat diperlukan untuk menangani bagaimana caranya memperbaiki birokrasi di Indonesia, karena setiap negara yang baik juga memiliki kondisi birokrasi yang baik dan stabil. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas bagaimana pelaksanaan birokrasi di Indonesia dan apakah sudah bisa dianggap efisien jika dibandingkan dengan karakteristik birokrasi menurut Max Weber, yang menyatakan birokrasi adalah sistem kekuasaan di mana pemimpin (*superordinat*) menjalankan kontrol atas bawahan (*subordinat*).

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah sarana utama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam usaha mencari kebenaran ilmiah, metode penelitian menjadi bagian yang penting dalam penyusunan penelitian. Penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya jika disusun dengan metode yang tepat. Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam penelitian ini, yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan menggambarkan peristiwa yang diamati secara menyeluruh. Data dalam tulisan ini berasal dari hasil penelitian atau studi sebelumnya yang relevan. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka.

² Pengaruh Politik Indonesia dalam Birokrasi. Prodi Ilmu Pemerintahan Terbaik di Sumut (uma.ac.id)

³ Dida Daniarsyah. 2015. Bureaucratic Political and Neutrality of Bureaucracy in Indonesia. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi. Volume V No. 2.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Reformasi Birokrasi

Sejarah birokrasi reformasi Indonesia setelah kemerdekaan, jajaran birokrasi Pemerintahan/Pegawai Negeri dikenal dengan istilah Pamong Praja, yang mana relevan untuk menggambarkan sebagaimana halnya ada lapisan hubungan antara abdi dalem dan priyayi, Pegawai Negeri pun terdiri dari berbagai pangkat, yaitu golongan dan eselon. Dalam semboyannya, pegawai negeri adalah abdi negara, sebuah ungkapan yang masih mengandung pengertian untuk berorientasi ke atas, yaitu penguasa. Hal ini mirip dengan karakteristik birokrasi kerajaan atau ambtenaar yang berorientasi ke atas yaitu kekuasaan atau rezim, daripada orientasi ke bawah yaitu pelayanan kepada publik. Pamong praja atau ambtenaar ini tampaknya cenderung lebih menekankan fungsinya sebagai pengatur, pengendali atau berorientasi pada pengawasan daripada berorientasi pada pelayanan.

Pada masa akhir pemerintahan Soekarno tampaknya belum atau tidak terjadi rasionalitas dan merit sistem dalam birokrasi karena terjadi ‘politisasi birokrasi’ yang berwujud pengisian jabatan di departemen-departemen oleh orang-orang partai politik. Politisasi partai terhadap birokrasi begitu dalam sehingga rekrutmen dan promosi jabatan di departemen-departemen pada semua tingkatan ditentukan terutama oleh loyalitas kepartaian seorang pegawai. Profesionalisme dan kinerja birokrasi saat itu tampak tidak dapat berjalan baik karena keseluruhan organnya sendiri, sudah menjadi lembaga politik. Sangat sulit untuk menjadi objektif bila lembaga yang fungsinya menjadi pengawas eksekutif di parlemen, karena bagian dari lembaga politik, tetapi sekaligus bertindak sebagai pelaksana, yaitu dirinya, yang akan diawasi kerjanya. Gejala tumpang tindih ini telah menimbulkan distorsi dan kekacauan fungsi kelembagaan negara.

Pada masa Orde Baru, birokrasi cenderung dijadikan sebagai mesin politik pada proses pemilihan umum. Organisasi birokrasi yaitu Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dijadikan bagian dari salah satu jalur di dalam GOLKAR, yaitu jalur B yang berguna untuk memperkuat dukungan Pegawai Negeri dalam setiap pemilihan umum. Pegawai Negeri diharuskan untuk hanya menyalurkan aspirasi politik mereka melalui GOLKAR dengan memberlakukan kebijakan monoloyalitas. Pada masa reformasi, meskipun indikator-indikator netralitas birokrasi lebih baik dibanding era sebelumnya, namun tetap saja belum mampu membebaskan birokrat sebagai instrumen yang bersih dari pengaruh politik. Liberalisasi politik yang menghapus monoloyalitas birokrasi pada parpol tertentu misalnya, di sisi lain menjadi bumerang ketika para birokrat ini menyalurkan dukungan politik mereka secara nyata kepada calon atau parpol tertentu.

Implementasi Reformasi Birokrasi

Dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia untuk reformasi birokrasi yang lebih efektif, langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam sistem birokrasi Indonesia tidak boleh diabaikan.

Langkah-langkah tersebut meliputi:

- 1) Penghapusan monoloyalitas birokrasi yang terkait dengan partai tertentu, seperti Golkar;
- 2) pengembangan netralitas birokrasi yang bebas dari pengaruh partai politik. Selain itu, birokrasi hanya diperbolehkan memilih, tetapi tidak boleh dipilih, kecuali jika mereka mengundurkan diri dari

jabatan negeri. Hal ini berarti bahwa birokrasi tidak berpartisipasi dalam politik, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1999 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik.

- 3) Sebagai konsekuensi dari langkah-langkah tersebut, setiap anggota birokrasi bebas dari tekanan untuk memilih dalam pemilu dan dapat memilih sesuai dengan keinginan mereka. Namun, perubahan yang dilakukan melalui langkah-langkah tersebut bisa dikatakan kurang efektif atau bahkan tidak berpengaruh terhadap sistem birokrasi secara keseluruhan, terutama dalam mengubah pola dan budaya kerja birokrasi yang cenderung korup (KKN). Dengan kata lain, tuntutan untuk reformasi birokrasi yang lebih luas belum terpenuhi.⁴

Dasar Hukum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Indonesia

Negara Indonesia memiliki kewajiban dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur di dalamnya tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang disebut dengan *good governance* yang merupakan efektivitas dari fungsi pemerintahan itu sendiri.

Dalam pelaksanaannya birokrasi sudah diatur dalam beberapa regulasi seperti dalam Perpres ataupun Permenpan.

- a. PERPRES Nomor: 81 Tahun 2010 yang mengenai bahasan tentang upaya dalam mempercepat tercapainya pemerintahan yang baik melalui Grand Design 2010-2025
- b. PERMENPAN Rancangan Birokrasi Nomor: 20 Tahun 2010 mengenai bahasan tentang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2010-2014 sebagai salah satu tindak lanjut dari Perpres No. 81 Tahun 2010
- c. PERMENPAN Rancangan Birokrasi mengenai :
 - Tercantum dalam PERMENPAN Reformasi Birokrasi No. 7-8 Tahun 2011 Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi K/L dan Pemda;
 - Tercantum dalam PERMENPAN Reformasi Birokrasi No. 9 Tahun 2011 Pedoman mengenai bagaimana penyusunan Road Map Birokrasi dan Pemda;
 - Tercantum dalam PERMENPAN Reformasi Birokrasi No. 10 Tahun 2011 mengenai Pedoman Pelaksanaan Quick Wins;
 - Tercantum dalam PERMENPAN No. 11 Tahun 2011 mengenai Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
 - Tercantum dalam PERMENPAN Reformasi Birokrasi No. 12 Tahun 2011 mengenai Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process)

⁴ Riyadi, "Reformasi Birokrasi Dalam Perspektif Perilaku Administrasi".

- Tercantum dalam PERMENPAN Reformasi Birokrasi No. 13 Tahun 2013 mengenai Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
- Tercantum dalam PERMENPAN Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management);
- Tercantum dalam PERMENPAN Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2011 mengenai Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi.⁵

Peran Birokrasi Pemerintah

- a. Pelaksanaan Kebijakan : Birokrasi bertugas untuk merealisasikan kebijakan pemerintah. Birokrasi pemerintah memiliki peran sentral dalam menerjemahkan visi, misi, dan tujuan negara ke dalam program dan kegiatan yang konkret melalui pelaksanaan kebijakan publik. Peran ini meliputi berbagai aspek, mulai dari perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, hingga evaluasi dan monitoring kebijakan. Birokrasi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara efektif dan efisien, serta memantau hasilnya untuk memperbaiki kebijakan jika diperlukan.⁶
- b. Pengawasan dan Regulasi : Birokrasi menjamin ketaatan terhadap hukum dan peraturan melalui pengawasan dan penegakkan aturan. Mereka memantau kegiatan organisasi dan individu untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta menangani pelanggaran dan mengambil tindakan hukum yang diperlukan. Birokrasi yang kuat adalah birokrasi yang mampu menempatkan politik sebagai kekuatan utama mensejahterakan masyarakat, sehingga politik dalam kontrol birokrasi bukan sebuah upaya kepentingan pribadi atau golongan tertentu, mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi/kelompok secara nyata dan bertanggung jawab.
- c. Pelayanan Publik : Birokrasi memberikan pelayanan dan prasarana kepada masyarakat melalui kesehatan, pendidikan, keamanan, dan infrastruktur. Mereka melakukan ini dengan cara mengorganisir dan mengelola layanan yang efektif dan efisien, serta memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang mudah ke layanan tersebut. Pemerintah mengoptimalkan penerapan pedoman penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang termuat dalam penyelenggaraan publik. Seperti kesederhanaan, yaitu prosedur pelayanan yang tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan, kepastian waktu, dimana pelayanan dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan, Kemudahan akses, dimana tempat pelayanan berlokasi di tempat yang

⁵ Dasar Hukum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, diakses melalui website: <https://www.menpan.go.id/site/reformasi-birokrasi/dasar-hukum1>

⁶ Kiki Endah, Endah V. 2021. Birokrasi Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Jurnal MODERAT, Volume 7, Nomor 3, ISSN: 2442-3777.

mudah dijangkau, memadai, memiliki jaringan telekomunikasi dan informasi yang lancar.⁷

- d. Perencanaan dan Penganggaran : Birokrasi berperan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran pemerintah melalui berbagai program dan proyek. Mereka mengumpulkan data dan melakukan analisis yang akurat untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pemerintah. Birokrasi juga memantau penggunaan anggaran dan mengambil tindakan jika diperlukan untuk memastikan penggunaan yang efektif dan efisien.⁸

Tantangan penerapan sistem birokrasi di Indonesia

Birokrasi memiliki peran yang penting di Indonesia, seperti yang sudah dijelaskan di atas, birokrasi berperan dalam segala aspek dari segi pelaksanaan kebijakan, pengawasan dan regulasi, pelayanan publik, hingga perencanaan dan penganggaran. Akan tetapi sayangnya dalam pelaksanaan dari penerapan itu sendiri masih belum maksimal dan masih muncul beberapa permasalahan yang masih sering terjadi. Walaupun sudah memegang peran yang besar, birokrasi tetap dihadapkan dengan beberapa tantangan yang memerlukan solusi, berikut merupakan tantangan dari penerapan birokrasi di Indonesia.

- a. Budaya birokrasi yang cenderung hierarkis dan berbelit-belit, korupsi, serta kurangnya kapasitas sumber daya manusia.
- b. Masih adanya ketimpangan dalam kualitas pelayanan publik antara daerah perkotaan dan pedesaan, tak jarang pengurusan dokumen memakan waktu yang lama melebihi standar yang seharusnya.
- c. Orientasi pelayanan yang kurang baik dibuktikan dengan masih adanya aparat yang bersikap kurang ramah dan membantu.
- d. Kurangnya transparansi dibuktikan dengan kurangnya informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan yang dibutuhkan

Upaya Pemerintah dalam Pelayanan Birokrasi di Bidang Hukum dan Politik

Diperlukan upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk membenahi kembali tatan birokrasi yang belum optimal, mengingat bahwa birokrasi merupakan suatu tatanan dengan peran yang kompleks, pemerintah bisa melakukan beberapa upaya, diantaranya :

- 1) Pemerintah berupaya melakukan perbaikan melalui berbagai program dan kebijakan, seperti pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN), penerapan meritokrasi dalam rekrutmen dan promosi ASN, serta peningkatan akuntabilitas melalui sistem pengawasan yang lebih ketat.
- 2) Inovasi pelayanan publik, seperti Mal Pelayanan Publik (MPP) yang menyediakan berbagai layanan dalam satu tempat, juga merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

⁷ Junindra Martua, Rahmat. 2019. Peran Birokrasi Pemerintah Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik. Volume 20 No. 1 ISSN 1411-0717

⁸ Birokrasi Pemerintahan : Ciri-ciri beserta Perannya. July 26, 2023. diakses melalui umsu.ac.id

- 3) Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik yang lebih transparan dan mudah diakses
- 4) Penguatan peran lembaga pengawas seperti KPK dan BPK diharapkan dapat mendorong akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan negara, sehingga meminimalisir potensi korupsi
- 5) Pembentukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Implementasi Etika dalam Birokrasi

Etika birokrasi adalah hal yang harus dijadikan fokus utama bagi pelaksanaannya, karena etika inilah yang nantinya akan menentukan bagaimana Indonesia bisa menghadapi permasalahan kompleks birokrasi pemerintah dimasa yang akan datang. Adanya ketidakjelasan pilihan dalam menghadapi suatu permasalahan acap kali membuat para pejabat menjadi bertindak semena-mena, antara pejabat satu dengan yang lain masih belum kompak dalam memutuskan suatu pemecahan masalah yang pada akhirnya bisa mengakibatkan perdebatan. Perbaikan dari etika birokrasi ini bisa saja menjadi fungsional terutama pada fungsi sebagai “policy guidance” terhadap para pelaksana birokrat sebagai sarana untuk solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Hal yang menjadi pemicu lainnya adalah mengenai keberhasilan pembangunan yang sudah meningkatkan kecepatan dan perubahan dalam lingkup birokrasi. Adanya perubahan atau dinamika yang terjadi di lingkup birokrasi nantinya akan menuntut birokrasi untuk menerapkan adjustments guna tetap bisa tanggap dalam menghadapi perubahan yang sudah terjadi di dalam lingkungannya. Kemampuan terhadap pelaksanaan adjustments itu kembali menuntut kekuasaan diskriminatif yang besar. Pelaksanaan kekuasaan dari direksi hanya bisa terlaksana dengan baik dan lancar jika birokrasi mempunyai pemahaman dan kesadaran yang tinggi berkenaan dengan luasnya kekuasaan yang dipunyai serta implikasi dari pemakaian kekuasaan tersebut untuk kepentingan masyarakatnya.

Melihat peran krusial birokrasi dalam kehidupan masyarakat, penerapan etika birokrasi menjadi semakin mendesak. Perubahan sikap dan perilaku para birokrat menjadi esensial untuk mewujudkan birokrasi yang beretika. Faktanya, minimnya gaji PNS dan pengawasan yang lemah dalam birokrasi turut berkontribusi pada pelanggaran etika. Bentuk penyimpangan etika seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih marak terjadi. Ketiga tindakan tersebut melanggar hukum dan seringkali melibatkan penyimpangan dan penyalahgunaan penegakan hukum. Hal ini berdampak pada etika administrasi negara dalam upaya revitalisasi manajemen pemerintahan dan penataan ulang pemerintahan Indonesia, yang bertentangan dengan prinsip good governance. Lemahnya penegakan hukum dalam manajemen pemerintahan di Indonesia menjadi ancaman serius bagi upaya penataan ulang pemerintahan yang sehat dan minim patologi dan maladministrasi. Penerapan prinsip good governance oleh seluruh birokrasi dapat meminimalisir penyimpangan dan membangun tata kelola pemerintahan yang baik.

KESIMPULAN

Indonesia menganut sistem parlementer dimana memiliki seorang Presiden sebagai kepala negara dan memiliki seorang Perdana Menteri untuk menjadi kepala pemerintahannya. Kemudian sistem pemerintahan Indonesia berubah menjadi

Presidensial, yaitu dipimpin oleh seorang Presiden yang sekaligus menjadi Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, sampai ada kesepakatan antara Indonesia dan Belanda tahun 1949. Indonesia kembali merubah sistem pemerintahannya seperti pada saat awal kemerdekaan Indonesia yaitu Sistem Parlementer dan konstitusi pun berubah menjadi UUD 1950 serta bentuk negara yang semula negara kesatuan juga berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden Tahun 1959, yang isinya kembali kepada UUD 1945, maka Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan namun tetap dengan menggunakan konstitusi UUD 1945.

Transparansi kinerja dan pelayanan terhadap publik yang dahulu terkesan alot dan sulit kini semakin dipermudah meskipun pada kenyataannya masih ada proses birokrasi yang dipersulit dan yang masih tertutup. Merubah tatanan birokrasi Indonesia tidaklah mudah. Semua itu memerlukan jangka waktu yang cukup panjang dan lebih lama untuk mengubah tatanan birokrasi yang alot, tertutup, menyulitkan dan buruk kinerjanya.

Tetapi saat ini birokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan semestinya meski belum ideal. Birokrasi dijadikan sebagai alat untuk mengatur suatu organisasi/pemerintahan agar berjalan efektif dan teratur. Birokrasi netral yang tidak berpolitik seperti pada saat orde baru. Masyarakat dan media massa maupun lembaga memiliki kebebasan dalam memantau berjalannya birokrasi yang dijalankan. Kebebasan Pers di Indonesia menjadikan segala bentuk penyelewengan akan lebih mudah terpublikasi dan diusut. Serta terdapatnya badan pengawas dalam pemerintahan yang bersifat netral guna mendorong terjadinya birokrasi yang netral di Indonesia.

Birokrasi sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dituntut untuk profesional dan tidak terkooptasi oleh kepentingan politik sehingga ia dapat menunjukkan postur ideal yang diharapkan publik. Liberalisasi politik sebagai akibat reformasi politik, di sisi lain memberikan godaan bagi birokrasi untuk bermain dalam ranah politik atau menciptakan ruang bagi munculnya politisasi terhadap birokrasi. Artikel ini membuktikan bahwa birokrasi sulit sekali melepaskan dirinya dari ranah politik. Untuk itu diperlukan implementasi aturan yang lebih tegas, sanksi yang berat bagi pelanggaran yang dilakukan birokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Birokrasi dan Administrasi Negara - ADM. NEGARA (administrasinegaraku.blogspot.com) di akses pada 25 Mei 2024

Birokrasi Pemerintahan : Ciri-ciri beserta Perannya. July 26, 2023. diakses melalui <https://pascasarjana.umsu.ac.id/birokrasi-pemerintahan-ciri-beserta-perannya/>

Dasar Hukum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, diakses melalui website: <https://www.menpan.go.id/site/reformasi-birokrasi/dasar-hukum1>

Dida Daniarsyah. Bureaucratic Political and Neutrality of Bureaucracy in Indonesia. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi. Volume V No. 2. Desember 2015.

Junindra Martua, Rahmat. 2019. Peran Birokrasi Pemerintah Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik. Volume 20 No. 1 ISSN 1411-0717. Citra Justicia. Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan.

Kiki Endah, Endah V. 2021. Birokrasi Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Jurnal MODERAT, Volume 7, Nomor 3 ISSN: 2442-3777 diakses melalui website: <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>

La Ode Wahiyuddin. Perjalanan Politik Birokrasi Di Indonesia: (Kajian Teori dan Analisis Konsep). Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal Volume 2 Issue 1, Maret 2022.

Pengaruh Politik Indonesia dalam Birokrasi. Prodi Ilmu Pemerintahan Terbaik di Sumut (uma.ac.id) diakses melalui <https://pemerintahan.uma.ac.id/2023/10/>

Riyadi. 2011. "Reformasi Birokrasi Dalam Perspektif Perilaku Administrasi" diakses melalui <https://administrasinegaraku.blogspot.com/2011/10/birokrasi-dan-administrasi-negara.html>